



**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2024.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	32
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.....	69
2.4 Penelaahan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat ...	81
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	81
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN	84
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional /Propinsi	84
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	110
3.3 Program dan Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan	112
BAB IV PENUTUP.....	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistim perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah. Renja OPD berhubungna langsung dengan pelayana masyarakat.

Renja Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2024. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan alasan perlu dilakukan perubahan Renja OPD Dinas Kesehatan Perubahan Tahun 2024. Sehubungan dengan hal di atas maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024. Di dalam Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat,propinsi dan daerah serta prioritas pembangunan 2024 yang digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2024. bahwasanya perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, telah ditemukan beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar/pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja OPD Dians Kesehatan Tahun 2024. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan ke dua.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kesehatan adalah :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- k. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12);
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota adalah:

- 1) sebagai upaya memenuhi kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan dalam tahun berjalan
- 2) Sebagai penjabaran dari rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
- 3) Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
- 4) Merumuskan prioritas dan sasaran dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2023
- 5) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Perubahan Kota Padang Panjang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan triwulan II tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Triwulan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
- 2.4 Penelaahan usulan program, kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat
- 2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional/Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan

BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan s.d Triwulan II 2024

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Hasil pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran kinerja sasaran yang telah di capai atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan dua tahun 2024 merupakan wujud dari kinerja secara menyeluruh dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan program dan kegiatan bersama masyarakat, Dalam pencapaian kinerja diatas Dinas Kesehatan juga mengacu kepada penetapan kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari SKPD.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik dan memenuhi target (indikator) dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja proram,kegiatan dan subkegiatan maka telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja TW II sebagaimana didisajikan dalam table 2.1 berikut.

BAB III Tabel E.81
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADANG PANJANG
BULAN MARET 2024

SKPD : DINAS KESEHATAN
PENGUNA KOTA PADANG PANJANG
ANGGARAN : dr. Faizah

NO.	Sasaran	Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Keg iatan	Indikator Kinerja Program(outc ome) Kegiatan(out put)	Target Kinerja Renstra Perangkat Darah Tahun 2024- 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
								I		II		III		IV				
						Kinerja (%)	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja		Ki ne rja	Rp . (0 00)	Ki ne rja	R P . (0 0 0 0)	Kinerja		Rp. (000)
I	Mening katnya derajat kesehat an masyara kat	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah	Persen tase pemen uhan urusan penunja ng yang dipenu hi	178.106.871.339	100%	144.042.763.016	25	%	29.200.448.679			38.978.954.051,0 0			25	%	68.179.402.730
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	170.454.745.206	100%	69.648.448.236	25	%	20.529.612.455			21.529.351.175,0 0			25	%	42.058.963.630

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	493	170.454.745.206	493	69.648.448.236	493		20.529.612.455			21.529.351.175,00					493		42.058.963.630
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		450.000.000	1 Tahun	247.180.000			-								1	tahun	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	493	450.000.000	2 Paket	247.180.000											0		-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		1.363.549.000	1 Tahun	467.479.900			89.329.191			58.537.268,00					1	tahun	147.866.459
		Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	87.222.900	5 Paket	28.920.100	2	pa ket	8.119.923	2	pake t	3.770.000,00					4	paket	11.889.923
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	302.668.000	5 Paket	99.736.600	2	pa ket	36.162.235	2	pake t	8.065.000,00					4	paket	44.227.235
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	123.658.100	5 Paket	38.825.200	2	pa ket	6.026.567	2	pake t	5.451.850,00					4	paket	11.478.417

		Penyelenggara rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	850.000.000	100 Laporan	299.998.000	20	laporan	39.020.466	20	laporan	41.250.418,00					40	laporan	80.270.884
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti																	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80%	560.000.000	30%	1.494.250.400	30	%	86.400.000			1.300.270.000,00					30	%	1.386.670.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraanPer orangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	350.000.000	1 Unit	90.000.000	1	unit	86.400.000								1	unit	86.400.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan		0	1 Unit	923.781.000						862.220.000,00					0	unit	862.220.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	210.000.000	9 Unit	480.469.400				9	unit	438.050.000,00					9	unit	438.050.000

		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.374.388.659	100%	1.427.272.043	25	%	274.326.912			293.466.337,00					100	%	567.793.249
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	18.290.000	12 Laporan	5.993.600	3	laporan	3.480.000	3	laporan	560.000,00					6	laporan	4.040.000
			Jumlah pembelian materai, jumlah dokumen yang dicetak/ digandakan dan alat tulis kantor yang disediakan																	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	661.530.339	12 Laporan	240.506.043	3	laporan	39.873.053	3	laporan	44.556.244,00					6	laporan	84.429.297
			Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan serta jumlah komponen listrik yang disediakan																	

		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.694.568.320	12 Laporan	1.180.772.400	3	laporan	230.973.859,00	3	laporan	248.350.093,00					6	laporan	479.323.952
			Jumlah pegawai harian yang dibayarkan honoranya																	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.904.188.474	100%	1.164.595.200	25	%	85.803.016			91.540.937,00					25	%	177.343.953
		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	105.000.000	1 Unit	33.600.000	1	unit	2.835.000,00			2.754.000,00					1	unit	5.589.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya	75 Unit	1.464.188.474	75 Unit	499.969.200	10	unit	78.088.016,00	20	unit	86.426.937,00					30	unit	164.514.953

		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	115.000.000	50 Unit	50.000.000	15	unit	4.880.000	15	unit	2.360.000,00					30	unit	7.240.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Gedung	220.000.000	3 Unit	581.026.000	3	gedung									3	unit	-
		Peningkatan Pelayanan BLUD					69.593.537.237			8.134.977.105			15.705.788.334,00					0	%	23.840.765.439
		Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Blud	197.491.561.577	5 Blud	69.593.537.237	5	blud	8.134.977.105	5	blud	15.705.788.334,00					10	blud	23.840.765.439
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	88%	44.816.086.591	88%	33.576.332.112	22	%	1.306.274.475			6.141.135.503,40					22	%	7.447.409.978
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	85%	1.960.000.000	75%	16.906.053.515	25	%	930.885.069			541.862.588,40					25	%	1.472.747.657
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang dibangun	1 Unit	600.000.000	1 Unit	400.000.000											0	unit	-

			Jumlah Pembangun an Labkes																
			Jumlah Dokumen Perencanaa n dan Pengawasa n																
		Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Saran, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	240.000.000	1 Unit	80.000.000	1	uni t	9.845.000		3.115.000,00					1	u n i t	12.960.000
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diadakan	1 Paket	300.000.000	1 Paket	624.770.000			578.400.000	12	unit					12	u n i t	578.400.000
		Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	4 Alat		114 Unit	81.048.580										0	u n i t	-
		pengembangan rumah sakit					14.250.000.000										0	%	-

		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan (belum diinput)	3 Paket	820.000.000	2 Paket	1.441.176.535	1	pa ket	342.640.068,50	2	Pake t	537.210.488,40					3	p a k e t	879.850.557
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	4 Distribusi		5 Paket	29.058.400	2	pa ket		2	pake t	1.537.100,00					4	p a k e t	1.537.100
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	4 Pencapaian	42.856.086.591		16.670.278.597			375.389.406			5.599.272.915,00					0	%	5.974.662.321
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1129	100.731.250	1129 Orang	20.000.150	202	or an g		182	oran g						384	o r a n g	-
			Jumlah Peserta Kegiatan																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1077	83.838.800	1077 Orang	19.999.900	204	or an g		194	oran g						398	o r a n g	-

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1026	132.860.900	1026 Orang	56.511.450	191	or an g				6.000.000,00					191	o r a n g	6.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3957	94.845.000	3957 Orang	25.005.000	623	or an g				220.500,00					623	o r a n g	220.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12241	104.845.000	12241 Orang	28.620.100	1024 8	or an g		1024 8	oran g						20496	o r a n g	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41185	91.341.300	27749 Orang	29.212.900	1310 9	or an g									13109	o r a n g	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4928	1.168.144.524	4928 Orang	426.311.700	1801	or an g	64.888.000	1083	oran g	83.697.900,00					2884	o r a n g	148.585.900
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	12234	120.000.000	7411 Orang	34.420.900	994	or an g		1223 4	oran g						13228	o r a n g	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	950	105.000.000	976 Orang	79.982.950	258	or an g		950	oran g	59.999.940,00					1208	o r a n g	59.999.940

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat Sesuai standar	117	53.000.000	128 Orang	14.999.100	63	or an g		117	oran g						180	o r a n g	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan Sesuai standar	2.331	105.000.000	1400 Orang	227.091.050	385	or an g		2331	oran g	196.083.500,00					2716	o r a n g	196.083.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1533	105.000.000	1533 Orang	29.995.300	422	or an g		1533	oran g						1955	o r a n g	-
		pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	36	60.000.000	12 Dokum en	18.470.500				6	doku men						6	d o k u m e n	-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	180 Dokum en	910.000.000	60 Dokum en	727.496.650	15	do ku me n	51.829.937	15	doku men	306.323.700,00					30	d o k u m e n	358.153.637
			Jumlah Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK dan Anemi yg diberikan PMT																	

			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survei Gizi																	
			Jumlah Kader Pendamping balita/ Bumil KEK																	
			Jumlah Peserta Pelatihan Program Gizi																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	19.585.450	3	do ku me n	1.202.000	1	doku men	9.443.200,00					4	d o k u m e n	10.645.200
			Jumlah Perja Informal yang terpantau Kesehatan	300 orang																
			Jumlah peserta sosialisasi dan pemeriksaan kebugaran ASN																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	155.530.000	12 Dokumen	207.820.800	3	do ku me n	32.255.424	3	doku men	149.297.500,00					6	d o k u m e n	181.552.924
			Jumlah Sampah Medis dan Obat Kadaluarst yg di	3000 kg																

			musnahkan																
			Jumlah Pelaksanaan Fogging	150 kali															
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen		5 Dokumen %	194.650.050	1	dokumen	3.014.800	2	dokumen	700.000,00				3	dokumen	3.714.800
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan					51.736.000						650.000,00				0	%	650.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dok	1.223.200.000	12 Dokumen	796.455.600	3	dokumen	64.195.250	3	dokumen	161.768.000,00				6	dokumen	225.963.250
			Jumlah peserta sosialisasi penyakit menular, dan Penyakit tidak menular	360 orang															
			Jumlah Pelaksanaan Posbindu PTM	27 posbindu															
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	15 Dok	34.590.504.120	15 Dokumen	9.710.532.600	3	dokumen	14.072.300	5	dokumen	4.120.957.900,00				8	dokumen	4.135.030.200

			Jumlah Masyarakat yg diberikan jaminan pelayanan kesehatan	22000 orang															
		pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional					3.240.000	1					211.000,00					1	211.000
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	3 Dokumen		1 Dokumen	24.999.950				1	dokumen	2.682.000,00					1	dokumen 2.682.000
			Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat																
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	144 Dok		48 Dokumen	720.000.000				24	dokumen	298.193.231,00					24	dokumen 298.193.231
		Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya			8 Dokumen	104.195.600			5.659.050	4	dokumen	32.336.300,00					4	dokumen 37.995.350
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di	4 Faskes		12 Faskes	149.998.000		4	faskes	5.269.200							4	faskes 5.269.200

		a	Kabupaten/ Kota																s	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)					9.000.000											0	%	-
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 PSC (Unit)	2.722.247.697	1 Unit	970.781.647	1	uni t ps c	133.003.445	1	unit psc	170.708.244,00					2	u n it	303.711.689
			Persetase Masyarakat yang tertangani	100%																
		Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria					1.985.500											0	%	-
		pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					89.400.000											0	%	-

		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Peningkatan			1.051.012.850			101.144.600			26.534.300,00					0	%	127.678.900
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	4 pemberian			10.000.300			0			279.300,00					0	%	279.300
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Kesehatan	37 Dokumen	56.000.000	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktek mandiri) Dokumen	10.000.300	24	fas ke s		37	doku men	279.300,00					61	f a s k e s	279.300
				35 (Puskemas, 4 Klinik, 2 RS, 25 Praktek mandiri)																
		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten /					8.400.000			0								0	%	-

		kota																		
		pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen		12 Dokumen	8.400.000	-			6	dokumen					6	dokumen	-	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Pengembangan			1.032.612.550			101.144.600			26.255.000,00				0	%	127.399.600	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	270 orang	140.000.000	50 Orang	1.032.612.550	1	orang	101.144.600	50	orang	26.255.000,00				51	orang	127.399.600	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat	4 pembinaan			403.159.450			97.418.950			63.753.700,00				0	%	161.172.650	

			kesehatan dan makan minum																	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 pemberian			76.747.700			36.041.400			2.645.700,00					0	%	38.687.100
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 sarana		30 Dokumen	76.747.700	30	do ku me n	36.041.400	30	doku men	2.645.700,00					60	d o k u m e n	38.687.100
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan dan pengawasan	22 sarana																

			Jumlah Petugas Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan sosialisasi	22 orang															
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	4 Rekomendasi			147.458.650			61.377.550			800.000,00					0 %	62.177.550

		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	90 dokumen		70 P-IRT	147.458.650	31	p-irt	61.377.550	10		800.000,00					41	p-irt	62.177.550
			Jumlah pengawasan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP)	30 P-IRT																
			Jumlah Pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP)																	

		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	4 Pelaksanaan			178.953.100						60.308.000,00					0	%	60.308.000
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 sampel	45.000.000	30 Sampel , 70 sasaran	178.953.100	-			10	sampel	60.308.000,00					10	s a m p e l	60.308.000
			Jumlah Sampel makanan dan minuman yang diuji																	
			Jumlah Sarana IRTP yang diawasi																	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	4 upaya			420.789.500			59.330.800			112.395.650,00					0	%	171.726.450

		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	4 Kegiatan			244.796.300			20.530.800			112.395.650,00					0	%	132.926.450
		Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36 Dokumen	940.000.000	12 Dokumen	244.796.300	3	Dokumen	20.530.800	3	dokumen	112.395.650,00					6	dokumen	132.926.450
			Jumlah sekolah yang dilatih SBH	90 orang																
			Jumlah kelurahan yang dilakukan monev	48 kelurahan																
			Jumlah lembaga yang penerima hibah	6 lembaga																
			Jumlah Masyarakat yang diberi KIE Pangan																	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	4 Kelurahan			34.229.800			-								0	%	-

		Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggara an promosi kesehatan dab gerakan hidup bersih dan sehat	3 Dokum en	105.000.000	1 Dokum en	34.229.800				1	doku men						1	dok u m e n	-
		pengembanga n dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	4 Kelura han			141.763.400			38.800.000								0	%	38.800.000
		bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil dan Supervisi Upauya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokum en		1 dokum en	141.763.400			38.800.000	1	Doku men						1	k e l u r a h a n	38.800.000
																		0%		0%
						Jumlah	179.494.056.928			30.764.617.503 ,50	-		45.322.773.204,4 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0 , 0 0 0	47,00		76.087.390.707 ,90

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja 2024 sampai dengan triwulan II dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 s.d. Triwulan II

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output/Sub Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Kesehatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Dinas Kesehatan tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun berjalan TW II (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								76.090.500.842,90	
1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								68.182.512.865	
1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							42.062.073.765	

1.02.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	500 Orang	1 Tahun	467 Orang	467 Orang	1 Orang	500 Orang		42.062.073.765	2	
1.02.0 1.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya						493 orang				
1.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah								147.866.459		
1.02.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	1,25 Jenis	5 Jenis		11.889.923	3	
1.02.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian materai, jumlah dokumen yang dicetak/ digandakan dan alat tulis kantor yang	4 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	1,25 Jenis	4 Jenis		44.227.235	4	

		disediakan										
1.02.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	1 Jenis	4 Jenis		11.478.417	3	
1.02.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	100 Kali	100 Kali	100 kali	100 kali	1 kali	100 Kali		80.270.884	3	
1.02.0 1.2.07	Pegadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.386.670.000		
	Pengadaan Kendaraan perorangan / kendaraan dinas jabatan									86.400.000		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan									862.220.000		
	Pengadaan dan peralatan mesin lainnya									438.050.000		
1.02.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan											

1.2.08	Daerah									567.793.249		
1.02.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	637 lembar	629 lembar	629 lembar	629 lembar	1 lembar	629 Lembar		4.040.000	3	
1.02.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan serta jumlah komponen listrik yang disediakan	600 tagihan	600 tagihan	600 tagihan	600 tagihan	1 tagihan	606 tagihan		84.429.297	3	
1.02.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor pegawai harian yang dibayarkan	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang	1 orang	37 Orang		479.323.952	3	
1.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									177.343.953		
1.02.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 Unit		5.589.000	3	

1.02.0 1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2, 3 dan 4 yang terpelihara	60 unit	60 unit	63 unit	60 unit	0,95 238 1 unit	60 Unit		164.514.953	3	
	Pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya									7.240.000		
1.02.0 1.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DKK)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara	7 gedung	7 gedun g	7 gedung	7 gedun g	1 gedun g	7 Gedung			3	
1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						#DI V/O!				#DIV/ O!	
	Pelayanan dan Penunjang BLUD	Pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun		23.840.765.439	3	
1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP	100%				#DI V/O!			7.447.409.977,90		
1.02.0 2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	60%				#DI V/O!			1.472.747.656,90		

	Daerah Kabupaten/Kota	(SPA)										
1.02.0 2.2.01. 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas dan RSUD	5 Unit	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1	4 Puskesmas			2	
	Pembangunan Puskesmas									0		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan /Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya									12.960.000		
	Pengadaan alat kesehatan dan Penunjang medic faskes									578.400.000		
	Pengembangan RS											
1.02.0 2.2.01. 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat dan vaksin pelayanan	2 paket	1 paket	2 paket	2 paket	1 paket	1 Paket			2	

1.02.0 2.2.01. 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah penyediaan bahan medis habis pakai, bahan kimia labor dan penunjang perbekalan kesehatan lainnya	3 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket			1	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai makanan dan minuman di faskes									879.850.556,90		
	Distribusi alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai makanan dan minuman di faskes									1.537.100		
1.02.0 2.2.01. 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1 Puskesmas	4 Puskesmas		0	3	
1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal					#DI V/O!			5.974.662.321		
1.02.0 2.2.02. 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Ibu	35 Orang	50 Orang	50 Orang	112 9 Orang	22,5 8 Orang	50 Orang		0	35	

		Hamil										
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80 Kegiatan	80 Kegiatan			#DI V/O!	80 Kegiatan			2	
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1010 Orang	1010 Orang	1010 Orang		0	1010 Orang			2	
1.02.0 2.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	60 Nakes dan lintas sektor	60 Nakes dan lintas sektor	60 Nakes dan lintas sektor	1077 Orang	17,95 Orang	60 Nakes dan lintas sektor		0	20	
		Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1023 orang		1120 Orang	60 orang	0,0535714 Orang	1120 Orang			1	
1.02.0 2.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan	50 Orang nakes			1026 orang	#DI V/O! Orang	60 Orang		6.000.000	22	

		Bayi Baru Lahir										
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30 Kegiatan				#DI V/O!	30 Kegiatan			1	
		Jumlah bayi baru lahir yang di SHK	300 bayi				#DI V/O!	300 Bayi			1	
		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1023 Bayi				#DI V/O!	1023 Bayi			1	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Balita	80 Orang	4 Puskesmas		5042 orang	#DI V/O! Orang	48 Orang		220.500.000	64	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan	50 Kegiatan				#DI V/O!	50 Kegiatan			1	

		Kesehatan Balita										
		Jumlah Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	399 7 Orang				#DI V/O!	399 7 Orang			1	
1.02.0 2.2.02. 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Guru yang dilatih dan sekolah yang dimonev	10 Sekolah				#DI V/O!	13 Sekolah		0	1	
		Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sesuai standar	134 46 Orang	13 Sekolah	134 46 orang	122 41 orang	0,91 038 23 Orang	134 46 Orang			2	
1.02.0 2.2.02. 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	80 Orang	40 Orang	40 Orang	411 85 orang	102 9,62 5 Orang	80 Orang		0	516	
		Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	352 90 Orang		352 90 Orang		0	352 90 Orang			1	

1.02.0 2.2.02. 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	473 9 orang					#DI V/O!	473 9 Orang		148.585.900	1	
		Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110 Orang	50 Orang	50 Orang	492 8 Orang	98,5 6 Orang	50 Orang				46	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35 Posyan du	35 Posya ndu	35 Posyan du	35 Posya ndu	1	35 Posyan du				3	
1.02.0 2.2.02. 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40 Orang	35 Orang	35 Orang	122 34 orang	349, 542 86 Orang	35 Orang			0	308	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis	16 Kejiata n				#DI V/O!	16 Kali				1	

		pelaksanaanP elayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										
		Jumlah Penderita Hipertensi usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	286 3 Orang		286 3 Orang		0	286 3 Orang			1	
1.02.0 2.2.02. 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40 Orang	40 Orang	40 Orang	775 orang	19,3 75 Orang	40 Orang		59.999.940	21	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16 Kegiatan				#DI V/O!	16 Kegiatan			1	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang	621 Orang		621 Orang		0	621 Orang			1	

		mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar										
1.02.0 2.2.02. 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	70 Orang	24 Orang	24 Orang	119 orang	4,95 833 33 Orang	70 Orang		0	3	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16 Kali				#DI V/O!	16 Kegiatan			1	
		Jumlah Penderita Gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	117 Orang		117 Orang		0	117 Orang			1	
1.02.0 2.2.02. 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah peserta sosialisasi orang terduga Tuberkulosis	70 Orang	80 Orang	70 Orang	233 1 Orang	33,3 orang	70 Orang		196.083.500	34	

		Jumlah Penderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	151 Orang		151 Orang		0	151 Orang			1	
1.02.0 2.2.02. 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100 Orang	1 Tahun	100 Orang	153 ₃ Orang	15,3 ₃ orang	100 Orang		0	16	
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	24 Kegiatan				#DI V/0!	24 Kegiatan			1	
		Jumlah Penderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	134 ₅ Orang		134 ₅ Orang		0	134 ₅ Orang			1	

		Jumlah penemuan Penderita baru HIV	28 Orang				#DI V/O!	28 Orang			1	
	KLB									0		
1.02.0 2.2.02. 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan bumil kurang Gizi yang diberikan PMT	40 Orang	40 Orang	40 Orang	103 orang	2,57 5 orang	40 balita dan ibu hamil		358.153.637	5	
		Jumlah Sekolah yang mendapat kan PMT AS	20 sekolah	40 Orang	32 Sekolah		0	20 Sekolah			3	
		Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan program gizi	150 Orang	137 Orang	137 Orang		0	137 Orang			2	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan surveilans	2 Kegiatan				#DI V/O!	2 Kegiatan			1	
		Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80 Orang				#DI V/O!	80 Orang			1	

1.02.0 2.2.02. 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Peserta Sosialisasi dan pemeriksaan Kebugaran CJH	160 Orang		150 Orang		0	150 Orang		10.645.200	1	
		Jumlah Peserta Sosialisasi dan pemeriksaan Kebugaran ASN,	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100 orang	1,66 666 67 Orang	60 Orang			4	
		Jumlah Peserta Sosialisasi POS UKK	40 Orang	150 Orang	40 Orang		0	40 Orang			1	
		Jumlah peserta Sosialisasi Kes ker pada pekerja informal	40 Orang				#DI V/O!	40 Orang			1	
1.02.0 2.2.02. 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pemusnahan obat kadaluarsa	500 kg	550 kg	500 kg	400 kg	0,8 kg	500 kg		181.552.924	3	
		Jumlah Penyemprotan	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	1 kali	50 Kali			3	
		Jumlah Sampah medis yang di bakar	300 kg		550 kg		0 kg	240 kg			1	

1.02.0 2.2.02. 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase pemantauan penyakit menular dan tidak menular	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	1 %	100 kasus		650.000	3	
	Promosi Kesehatan									3.714.800		
1.02.0 2.2.02. 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah pemantauan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza di wilayah kerja	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1				2	
1.02.0 2.2.02. 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jemaah haji yang mendapat pembinaan	140 Orang	120 Orang	100 Orang	100 Orang	1 Orang	110 Orang			2	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 kegiatan	5 Kegiatan			3	
		Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	1	100 %			2	
1.02.0 2.2.02. 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta sosialisasi penyakit menular, dan penyakit tidak	80 Orang	50 Orang	120 Orang	240 Orang	2 Orang	40 Orang		225.963.250	4	

		menular										
		Jumlah Posbindu PTM yang dilaksanakan	27 Posbindu	27 Posbindu	27 Posbindu	27 Posbindu	1 %	27 Posbindu			3	
1.02.0 2.2.02. 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan JKSS dan JKM PP	20615 Orang	20615 Orang	20615 Orang	20615 Orang	1 orang	20615 Orang		4.135.030.200	3	
		Terlaksananya sosialisasi JKN	280 Orang	280 Orang			#DI V/O!				1	
		Persentase pembayaran biaya operasional dan BMHP	100 Persen				#DI V/O!				0	
		Persentase pembayaran jasa pelayanan	100 Persen				#DI V/O!				0	
	Pengambilan dan pengiriman specimen Penyakit potensi KLB									211.000		
1.02.0 2.2.02.	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di	Jumlah peserta sosialisasi	40 Orang	40 Orang	40 Orang	15 orang	0,375 orang	40 Orang			2	

28	Fasyankes dan sekolah	(Anak Sekolah) tentang penyalahgunaan Napza										
		Jumlah Masyarakat yang yg dilakukan deteksi dini penyalahgunaan Napza	400 Orang	200 Orang	200 Orang	20 orang	0,1	400 Orang			2	
1.02.0 2.2.02. 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat	7 Tatanan	7 Tatanan	7 Tatanan	7 Tatanan	1 tatanan	7 Tatanan		2.682.000	3	
1.02.0 2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yg melaksanakan Pelayanan Preventif, Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1 puskesmas	4 Puskesmas		298.193.231	3	
1.02.0 2.2.02. 33	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan pelayanan fasilitas kesehatan					#DIV/0!				#DIV/0!	
1.02.0 2.2.02. 34	Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya						#DIV/0!	80 persen		37.995.350	#DIV/0!	

1.02.0 2.2.02. 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang dilakukan pemantauan mutu internal dan eksternal dengan survey Akreditasi	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	1	4 Puskesmas		5.269.200	3	
	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan pasca Immunisasi									0		
1.02.0 2.2.02. 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Penanganan Kejadian Luar Biasa	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 Persen			3	
1.02.0 2.2.02. 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan masyarakat yang terlayani pada SPGDT	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 Persen		303.711.689	3	
	Pelayanan Kesehatan Malaria									0		
	Upaya Kesehatan ibu dan anak									0		
1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM					#DI V/O!			127.678.900	#DIV/ O!	

1.02.0 3.2.03	Pemberian izin praktek tenaga Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									279.300	#DIV/0!	
1.02.0 3.2.03.01	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek nakes									279.300	4	
	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di wilayah kab /kota									0		
	Pembinaan dan pengawasan SDM									0		
1.02.0 3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80 Orang	50 Orang	80 Orang	1,6			127.399.600	#DIV/0!	

1.02.0 3.2.03. 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui Uji Kompetensi	60 Orang	80 Orang	50 Orang	80 Orang	1,6	60 Orang		127.399.600	4	
1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum					#DIV/0!			161.172.650	#DIV/0!	
	Pembian izin Apotik ,Toko obat,took alkes dan Optikal usaha mikro obat tradisonal									38.687.100		
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan izin Apotik ,Toko obat,took alkes dan Optikal usaha mikro obat tradisonal									38.687.100		

1.02.0 4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga					#DI V/O!			62.177.550	#DIV/ O!	
1.02.0 4.2.03. 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pelaku Usaha IRTP yang diberikan Bimtek	75 Orang		100 Orang		0		45 Orang	62.177.550	#DIV/ O!	
1.02.0 4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri						#DI V/O!			60.308.000	#DIV/ O!	

	Rumah Tangga											
1.02.0 4.2.06. 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sampel makanan dan minuman yang diuji	30 Sampel		30 Sampel		0	30 Sampel		60.308.000	1	
		Jumlah Sarana IRTP yang diawasi	70 sarana IRTP		70 sarana IRTP		0	70 sarana IRTP			1	
1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan masyarakat dengan PHBS					#DI V/O!			171.726.450	#DIV/ O!	
		Persentase Upaya Promosi Kesehatan					#DI V/O!				#DIV/ O!	
1.02.0 5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota					#DI V/O!			132.926.450	#DIV/ O!	

1.02.0 5.2.01. 01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah guru UKS yang ikut sosialisasi	10 Sekolah	50 Orang	50 Orang	50 Sekolah	1	15 Orang		132.926.450	12	
		Jumlah lembaga yang menerima hibah	1 Lembaga				#DI V/O!	1 Lembaga			1	
		Jumlah sekolah yang dilatih SBH	10 Sekolah	13 Sekolah	13 Sekolah	50 Sekolah	3,84 615 38	15 Sekolah			8	
		Jumlah kelurahan yang dilakukan monev	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	1	16 Kelurahan			3	
		Jumlah masyarakat yang diberikan KIE Keamanan Pangan	300 Orang	16 Kelurahan	275 Orang	605 Orang	2,2	30 Orang			2	
		Jumlah kader/ petugas yang ikut sosialisasi	50 Orang				#DI V/O!	50 Orang			1	
	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tk daerah Kab/kota									0		

	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Germas									0		
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaty akesehatan bersumber berdaya masyarakat (UKBM) tingka Kab /kota									38.800.000		
1.02.0 5.2.03. 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah tenaga penyuluhan yang ikut Bimtek, Jumlah kader UKBM, BATRA yang ikut Bimtek					#DI V/O!	3	Kali	38.800.000	#DIV/ O!	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Analisis kinerja dilakukan terhadap indikator tujuan dan sasaran. Untuk indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut. Dari data capaian Indikator Sasaran/program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperoleh dari data pencapaian Kota dan dihitung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang
Tabel 2.2.1**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rasio Daya Tampung RumahSakit Terhadap Jumlah Penduduk											
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi											
1	PelayananHamil Kesehatan Ibu hamil	√	√	100%	100%	100%	100%		81,31	100%	100%	Terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja yang cukup signifikan Penurunan realisasi dikarenakan pada saat covid-19, Ibu balita enggan membawa balitanya ke Posyandu
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	√	√	100%	100%	100%	100%		82,92	100%	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	√	√	100%	100%	100%	100%		82,65	100%	100%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	√	√	100%	100%	100%	100%		77,15	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	√	√	100%	100%	100%	100%		85,60	100%	100%	Terjadi peningkatan

6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	√	√	100%	100%	100%	100%		61,32	100%	100%	realisasi capaian kinerja
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	√	√	100%	100%	100%	100%		94,36	100%	100%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	√	√	100%	100%	100%	100%		30,71	100%	100%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	√	√	100%	100%	100%	100%		100	100%	100%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	√	√	100%	100%	100%	100%		100	100%	100%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TB)								66,32			
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV								87,67			

Tabel 2.2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025
					2024	2025	2026	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
II	Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0.308	3.029	3.03	3.031	3.032	3.032
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91.98	81.311	83.311	85.311	87.311	87.311
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85.268	82.916	83.916	84.916	85.916	85.916
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91.887	82.651	84.651	86.651	88.651	88.651
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	64.148	77.154	77.654	78.154	78.654	78.654
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94.127	81.598	82.598	83.598	84.598	84.598
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	30.329	61.323	64.323	67.323	70.323	70.323

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025
					2024	2025	2026	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	53.076	94.356	94.556	94.756	94.956	94.956
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	98.291	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	87.736	87.671	87.871	88.071	88.271	88.271
15	Prevalensi Stunting	%		14.76	11.05	10.03	9.01	9.01
16	Umur Harapan Hidup	Tahun		73.02	73.03	73.04	73.06	73.06
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks		0.44	0.47	0.49	0.51	0.51
18	Persentase Penurunan Kematian Ibu	%		33	25	25	25	25
19	Persentase Penurunan	%		18.2	20	20	20	20

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2021	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2022	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2025
					2024	2025	2026	
	Kematian Bayi							
20	Presentase UHC	%		98.9	99.28	99.2	99.3	99.3
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%		NA	0,88	0,91	0,94	0,94
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%		NA	65	68,75	72,5	72,5
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru)	%		NA	76,66	83,33	90	90
24	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%		NA	0,9625	98,125	100	100
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%		NA	96,25	98,125	100	100
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	%		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%		1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
29	Indek Keluarga Sehat	indek		0,44	0,47	0,49	0,51	0,51

Capaian Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026
Tabel 2.2.3

NO	INDIKATOR SESUAI TUPOKSI SKPD	Satuan	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE			RASIO CAPAIAN TAHUN KE		
						1	2	3	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka				0,47	0,49	0,51						
2	Persentase Penurunan Kematian Ibu	Persentase				25%	25%	25%						
3	Persentase Penurunan Kematian Bayi	Persentase				20%	20%	20%						
4	Presentase UHC	Persentase				99,20%	99,20%	99,30%						

Dari Tabel diatas dapat dianalisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Persentase penurunan Kematian Ibu

AKI dan AKB merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKI dan AKB menjadi masalah yang sangat mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, dan merupakan indikator utama yang harus dituntaskan permasalahannya, Tetapi belum saja bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan.

AKI merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKI menjadi masalah yang sangat mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, tetapi belum saja bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan.

Penurunan AKI dan AKB juga merupakan penentu tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) yang merupakan urusan wajib di bidang kesehatan. Untuk Angka harapan hidup kita tidak dapat menggunakannya karena angka kematian memakai rumus per seribu kelahiran sedang untuk Kota Padang Panjang tidak mencapai 1000 kelahiran setiap tahunnya.

Untuk Tahun 2024 ini kita menggunakan Indikator kinerja dengan penurunan jumlah kematian ibu yaitu menargetkan setiap tahun jumlah kematian ini berkurang sebanyak 20% dimana ditahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 3 orang maka untuk tahun 2022 ini untuk mencapai target 20% penurunan jumlah kematian ibu itu paling banyak 1 orang, pada tahun 2023 ini belum mencapai sesuai yg targetkan dimana jumlah kasus kematian pada tahun 2022 ini sebanyak 2 kasus kematian ibu dimana kemaian ibu tersebut disebabkan oleh Preeklamsi .

2. Persentase penurunan Kematian Bayi

AKB merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan

hidup suatu masyarakat. Peningkatan AKB menjadi masalah yang sangat mendasar, karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya, tetapi belum saja bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan di bidang kesehatan. Untuk Angka harapan hidup kita dapat menggunakannya karena untuk angka kematian kita memakai rumus per seribu kelahiran sedang untuk Kota Padang Panjang tidak mencapai 1000 kelahiran.

Untuk Tahun 2023 ini kita menggunakan Indikator kinerja dengan penurunan jumlah kematian Bayi yaitu kita menargetkan setiap tahun jumlah kematian ini berkurang sebanyak 25% dimana ditahun 2022 jumlah kematian Bayi sebanyak 11 orang sedangkan untuk tahun 2023 ini jumlah kematian Bayi sesuai target penurunnya paling banyak adalah 9 orang ditahun 2023 sedangkan jumlah kematian bayi di tahun 2023 sebanyak 2 orang , dapat dilihat penurunan kematian bayi yg ditargetkan minimal 6 orang sudah melebihi dari target penurunan 20 % sehingga penurunan kematian sebanyak 25% bisa kita capai, jumlah kematian bayi sebanyak 9 orang ini menunjukkan penurunan jumlah kematian dari tahun sebelumnya,

Faktor penyebab kematian pada bayi adalah Aspexia, BBLR dan kelaianan bawaan, meskipun demikian diharapkan tidak ada kematian pada bayi ditahun berikutnya .

3. Indeks Keluarga Sehat.

Kementerian Kesehatan telah merumuskan 12 indikator yang dipakai untuk menentukan indikator keluarga sehat dengan kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

- a) Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).
- c) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu:

HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak

- d) Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7-23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).
- e) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2-59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ buku KIA.
- f) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosisis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
- g) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosisis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- h) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- i) Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
- j) Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.
- k) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
- l) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS $> 0,8$, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS $0,5 \leq 0,8$ dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS $< 0,5$.

Jika dilihat dari nilai IKS Padang Panjang masih termasuk keluarga tidak sehat untuk target Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2022 adalah 0,45. Dengan capaian Tahun 2022 adalah 0,44 atau sebesar 97,78%. Dapat kita bandingkan dengan IKS tahun 2021 ditahun 2022 ini IKS di Kota Padang Panjang lebih baik dari tahun 2021 yaitu 0,39, sedangkan sampai dengan Tahun 2022 ini Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang dari target 0,55 tercapai 0,46 atau 83,64 %.

Pencapaian Kota Padang panjang Tahun 2022 sebesar 0,44 terdapat peningkatan IKS penduduk Kota Padang Panjang dari tahun sebelumnya tetapi tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan karena ada beberapa Indikator yg tidak tercapai disini lebih keprilaku karena untuk merubah kebiasaan merokok dimasyarakat sangatlah sulit, Penderita hipertensi yang enggan untuk memeriksakan kesehatan dan meminum obat secara rutin.

4. Persentase Universal Health Coverage (UHC)

UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.

Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, POLRI dan Jamkesmas) diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), demikian pula dengan Program JKMP dan JKSS.

Pemerintah bertanggung jawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya termaktub dalam sistem jaminan kesehatan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang masih tetap mengembangkan dan mengalokasikan

anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, dengan 2 (dua) sasaran yang berbeda :

- a. Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam basis data pusat/ Basis Data Terpadu (BDT).
- b. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat kota Padang Panjang, Capaian Indikator Persentase Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023 adalah 101,58% dari target 98,91% (102,70 %) dimana Pemerintah Kota Padang Panjang sudah memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya melebihi dari yang ditargetkan ditahun 2023 ,hal ini dapat kita lihat keseriusan Pemko Padang Panjang untuk memberikan jaminan Kesehatan kepada Masyarakatnya.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Keberhasilan yang diperoleh dari suatu pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan berhubungan erat dengan kepuasan pasien atau masyarakat.Indek Kepuasan Masyarakat menjadi Indikator Kinerja pada RSUD Kota Padang Panjang. Adanya perubahan paradigma baru pembangunan kesehatan, dimana pelayanan kepada masyarakat menjadi aspek penting untuk dikedepankan, maka pelayanan masyarakat dibidang kesehatan juga perlu semakin ditingkatkan.

Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan ini membawa konsekuensi perlunya peningkatan tenaga kesehatan yang terampil. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Reformasi di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikan pelayanan kesehatan lebih efisien, efektif, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indek Kepuasan masyarakat Kota Padang Panjang tahun 2023 dengan target A dimana capaian Indek Kepuasan masyarakat di Rumah sakit pada Tahun 2023 ini dengan Nilai A, dimana RSUD dari tahun ketahun berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dari sarana prasarana maupun pelayanan kepada masyarakat.

6. Menurunnya Prevalensi Stunting dengan indicator sasaran Persentase Puskesmas yang melakukan surveilans gizi, Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik, Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada Balita gizi kurang.

Berdasarkan sumber data E-pggbm (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) diketahui sekitar 419 balita stunting dari 3.330 balita yang diukur, dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa prevalensi stunting pada balita adalah sebesar 14,74% , kondisi tersebut menggambarkan bahwa pencapaian target prevalensi stunting telah melampaui target Renstra Kota Padang Panjang tahun 2022 yaitu 15,51%. dimana terjadi penurunan dari tahun 2021 yang terjaring balita stunting sebanyak 519 balita.

Beberapa faktor pendukung pencapaian target adalah :

1. Penguatan surveilans gizi dengan meningkatkan deteksi dini masalah gizi pada balita pada pemantauan tumbuh kembang pada posyandu balita setiap bulan dengan dibuktikan peningkatan jumlah kunjungan balita ke posyandu dari tahun 2021 D/S sekitar 82,68% dan pada tahun 2022 sekitar 87.31%.
2. Pemberian makanan tambahan pabrikan pada balita gizi kurang dan bumil KEK bertujuan menambahkan asupan gizi dalam upaya perbaikan status gizi yang didistribusikan pada saat sasaran di rujuk ke puskesmas.
3. Pembentukan Pos Gizi di beberapa kelurahan di wilayah kerja puskesmas, sebagai tempat penyelenggaraan makanan tambahan lokal (PMT Lokal) bagi balita dan bumil dengan mengkombinasikan peningkatan pengetahuan ibu balita dan ibu hamil.
4. Penguatan perluasan sasaran edukasi gizi sejak dari hulu (calon ibu) di mulai dari peningkatan edukasi gizi pada remaja putri dan calon pengantin agar pahami pentingnya gizi seimbang sesuai kebutuhan.
5. Penguatan kualitas pelayanan dan integrasi program dalam integrasi konseling dan penyuluhan gizi pada Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di setiap kelurahan.
6. Penguatan koordinasi lintas OPD terkait intervensi spesifik dan sensitive bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita.
7. Optimalisasi kegiatan konvergensi stunting lintas OPD terkait pemetaan sasaran perwilayah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPD tahun 2024.

Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya tetapi ada program dan kegiatan yang baru menggunakan selain APBD. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.4 TC 3.1

Tabel 2.2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Kesehatan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Sumber Dana
Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 144,525,259,717	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 144,322,759,217	APBD
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang	100 %	Rp 129,115,980,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pemenuhan urusan penunjang	100 %	Rp 128,913,435,535	

	KABUPATEN/ KOTA		dipenuhi			KABUPATEN/KOTA		yang dipenuhi			
1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 60,051,653,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Rp 60,051,653,000	
1.02.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	493 Orang	Rp 60,051,653,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	493 Orang	Rp 60,051,653,000	
1.02.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp 150,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp 247,500,000	
1.02.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp 150,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Rp 247,500,000	
1.02.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat		Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	Rp 467,661,550	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	Rp 467,617,700	

	Daerah		Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
1.02.0 1.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	Rp 29,074,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	Rp 29,031,500	
	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 7,716,300	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 7,673,500	
	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 5,683,000	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 5,683,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 5,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 5,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 5,000,000	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 5,000,000	
	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 5,675,000	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 5,675,000	

1.02.0 1.1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	Rp 99,758,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	Rp 99,757,450	
	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 38,606,600	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 38,606,600	
	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 15,287,900	
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 15,287,150	
	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 15,287,900	
	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 15,287,900	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 15,287,900	
1.02.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	Rp 38,829,050	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	Rp 38,828,750	
	Dinas Kesehatan			1 Paket	Rp 24,999,850	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Paket	Rp 24,999,550	

	dan IFK										
	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Bukit Surungan			1 Paket	Rp 3,457,300	
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Paket	Rp 3,457,300	
	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Koto Katiak			1 Paket	Rp 3,457,300	
	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 3,457,300	Puskesmas Gunung			1 Paket	Rp 3,457,300	
1.02.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah lapran peneyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp 300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah lapran peneyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp 300,000,000	
	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 300,000,000	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 300,000,000	

1.02.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80 %	Rp 419,434,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	80 %	Rp 119,434,000	
1.02.0 1.1.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	Rp 300,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	Rp -	
1.02.0 1.1.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	Rp 119,434,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	Rp 119,434,000	
1.02.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 1,428,897,153	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 1,428,896,188	

1.02.0 1.1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan surant menyurat yang disediakan	12 Lapor an	Rp 6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan surant menyurat yang disediakan	12 Lapora n	Rp 6,000,000	
	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 2,000,000	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 2,000,000	
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 1,000,000	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 1,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 1,000,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 1,000,000	
	Puskesmas Gunung				Rp 1,000,000	Puskesmas Gunung				Rp 1,000,000	
1.02.0 1.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lapor an	Rp 240,510,113	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lapora n	Rp 240,509,788	

	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 58,376,238	Dinas Kesehatan dan IFK				Rp 58,376,238	
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 45,598,525	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 45,598,200	
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 48,400,190	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 48,400,190	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 46,239,100	Puskesmas Koto Katiak				Rp 46,239,100	
	Puskesmas Gunung				Rp 41,896,060	Puskesmas Gunung				Rp 41,896,060	
1.02.0 1.1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 1,182,387,040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 1,182,386,400	
	Dinas Kesehatan dan IFK				436,053,440	Dinas Kesehatan dan IFK				436,052,800	
	Puskesmas Bukit				212,478,400	Puskesmas Bukit Surungan				212,478,400	

	Surungan										
	Puskesmas Kebun Sikolos				210,019,200	Puskesmas Kebun Sikolos				210,019,200	
	Puskesmas Koto Katiak				108,182,400	Puskesmas Koto Katiak				108,182,400	
	Puskesmas Gunung				174,553,600	Puskesmas Gunung				174,553,600	
	Rumah Sakit				41,100,000	Rumah Sakit				41,100,000	
1.02.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 685,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp 685,000,000	
1.02.0 1.1.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 35,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 35,000,000	

1.02.0 1.1.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya	75	Unit	Rp 500,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya	75	Unit	Rp 500,000,000	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya			Rp 280,000,000	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya			Rp 280,000,000	Rp -
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak			Rp 55,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya			Rp 55,000,000	

			perizinannya								
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	

	Puskesmas Gunung		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	Puskesmas Gunung		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		Rp 55,000,000	
1.02.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Lainnya yang dipelihar	50 Unit	Rp 50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Lainnya yang dipelihar	50 Unit	Rp 50,000,000	
1.02.0 1.1.09 .11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	Rp 100,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	Rp 100,000,000	
1.02.0 1.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp 65,913,334,897	Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp 65,913,334,647	

1.02.0 1.1.10 .01	Pelayanan dan Penunjang BLUD		Junlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	Rp 65,913,334,897	Pelayanan dan Penunjang BLUD		Junlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	Rp 65,913,334,647	
1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	80 %	Rp 14,971,279,117	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	80 %	Rp 14,971,321,782	
1.02.0 2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	75 %	Rp 980,000,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	75 %	Rp 980,000,000	
1.02.0 2.2.01 .02	Pembangunan Puskesmas		Jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang dibangun	1 Unit		Pembangunan Puskesmas		Jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang dibangun	1 Unit		

			Jumlah lahan Poskeskel yg diadakan	1 Lokasi	Rp 400,000,000			Jumlah lahan Poskeskel yg diadakan	1 Lokasi	Rp 400,000,000	
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah sakit berdasarkan kelas rumah yang memenuhi rasio tempat tidur sakit	2 Unit		Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah sakit berdasarkan kelas rumah yang memenuhi rasio tempat tidur sakit	2 Unit		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diadakan	1 Paket	Rp 100,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diadakan	1 Paket	Rp 100,000,000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	Rp 250,000,000	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	Rp 250,000,000	

1.02.0 2.2.01 .17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	Rp 150,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	Rp 150,000,000	
1.02.0 2.2.01 .18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	4 Pusk	Rp 80,000,000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	4 Pusk	Rp 80,000,000	
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 20,000,000	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 20,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 20,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 20,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 20,000,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 20,000,000	
	Puskesmas Gunung				Rp 20,000,000	Puskesmas Gunung				Rp 20,000,000	
1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 %	Rp 13,991,279,117	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 %	Rp 13,991,321,782	

	ota										
1.02.0 2.2.02 .01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1129 orang	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1129 orang	Rp 20,000,150	
1.02.0 2.2.02 .02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1077 orang	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1077 orang	Rp 19,999,900	
1.02.0 2.2.02 .03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1026 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1026 orang	Rp 35,040,000	
1.02.0 2.2.02 .04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	3957 orang	Rp 25,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3957 orang	Rp 25,005,000	

			standar								
1.02.0 2.2.02 .05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12241 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12241 orang	Rp 35,000,500	
1.02.0 2.2.02 .06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41185 orang	Rp 30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41185 orang	Rp 29,979,000	
1.02.0 2.2.02 .07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4928 orang	Rp 427,300,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4928 orang	Rp 427,312,000	

	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 84,700,000	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 84,712,000	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 93,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 93,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 76,800,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 76,800,000	

	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 67,200,000	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 67,200,000	
	Puskesmas Gunung		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 105,600,000	Puskesmas Gunung		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Rp 105,600,000	
1.02.02.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	12234 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	12234 orang	Rp 34,999,800	
1.02.02.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan	950 orang	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan	950 orang	Rp 19,999,750	

			Sesuai standar					Sesuai standar			
1.02.0 2.2.02 .10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah orang yang mendapat pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat Sesuai standar	117 orang	Rp 15,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah orang yang mendapat pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat Sesuai standar	117 orang	Rp 14,999,700	
1.02.0 2.2.02 .11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan Sesuai standar	2331 orang	Rp 35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan Sesuai standar	2331 orang	Rp 34,999,950	
1.02.0 2.2.02 .12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1533 orang	Rp 30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1533 orang	Rp 29,999,700	

	pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	Dokumen	Rp 20,000,000	pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	Dokumen	Rp 19,999,700	
1.02.0 2.2.02 .15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	60	Dokumen	Rp 300,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	60	Dokumen	Rp 299,990,400	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK dan Anemi yg diberikan PMT	60	Orang	Rp 100,661,600	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK dan Anemi yg diberikan PMT	60	Orang	Rp 100,652,000	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Program Gizi	4	Kali	Rp 50,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Program Gizi	4	Kali	Rp 50,000,000	

	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 50,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 50,000,000	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 50,000,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 50,000,000	
	Puskesmas Gunung				Rp 49,338,400	Puskesmas Gunung				Rp 49,338,400	
1.02.0 2.2.02 .16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Dokumen	Rp 20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Dokumen	Rp 19,999,950	
1.02.0 2.2.02 .17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	Rp 75,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	Rp 75,000,000	
			Jumlah Sampah Medis dan Obat Kadaluarsa yg di musnahkan	1,000 Kg				Jumlah Sampah Medis dan Obat Kadaluarsa yg di musnahkan	1,000 Kg		

			Jumlah Pelaksanaan Fogging	50 Kali				Jumlah Pelaksanaan Fogging	50 Kali		
1.02.0 2.2.02 .23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	8 Dokumen	Rp 554,364,300	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	8 Dokumen	Rp 548,833,615	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah pelaksanaan pembinaan jemaah haji	5 Kali	Rp 177,520,300	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah pelaksanaan pembinaan jemaah haji	5 Kali	Rp 181,989,615	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	5 Kegiatan	Rp 96,620,400	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	5 Kegiatan	Rp 86,620,400	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani	100 %	Rp 97,466,200	Puskesmas Kebun Sikolos		Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani	100 %	Rp 97,466,200	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 96,191,200	Puskesmas Koto Katiak				Rp 86,191,200	

	Puskesmas Gunung				Rp 86,566,200	Puskesmas Gunung				Rp 96,566,200	
1.02.0 2.2.02 .25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 doku men	Rp 313,572,400	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokum en	Rp 319,122,200	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penyakit Menular dan tidak menular	40 Orang	Rp 124,772,400	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penyakit Menular dan tidak menular	40 Orang	Rp 124,722,200	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan Pos Bindu PTM	27 Pos bindu	Rp 52,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah pelaksanaan Pos Bindu PTM	27 Pos bindu	Rp 57,600,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah pelaksanaan penjangkaran PTM	2 Kegiat am	Rp 50,400,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah pelaksanaan penjangkaran PTM	2 Kegiat am	Rp 50,400,000	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 43,200,000	Puskesmas Koto Katiak				Rp 43,200,000	

	Puskesmas Gunung				Rp 43,200,000	Puskesmas Gunung				Rp 43,200,000	
1.02.0 2.2.02 .26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	15 Dokumen	Rp 10,667,394,720	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	15 Dokumen	Rp 10,667,394,720	
	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Masyarakat yg diberikan jaminan pelayanan kesehatan	22000 Orang	Rp 7,588,192,580	Dinas Kesehatan dan IFK		Jumlah Masyarakat yg diberikan jaminan pelayanan kesehatan	22000 Orang	Rp 7,588,192,580	
	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 850,000,000	Puskesmas Bukit Surungan				Rp 850,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,015,202,340	Puskesmas Kebun Sikolos				Rp 1,015,202,340	
	Puskesmas Koto Katiak				Rp 563,999,800	Puskesmas Koto Katiak				Rp 563,999,800	
	Puskesmas Gunung				Rp 650,000,000	Puskesmas Gunung				Rp 650,000,000	

1.02.0 2.2.02 .29	Penyelenggara an Kabupaten/Ko ta Sehat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	1 Doku men	Rp 25,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	1 Dokum en	Rp 24,999,850	
			Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat	10 Tatan an				Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat	10 Tatana n		
1.02.0 2.2.02 .33	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Doku men	Rp 100,000,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Dokum en	Rp 99,998,000	
1.02.0 2.2.02 .33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Doku men	Rp 120,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokum en	Rp 120,000,000	
	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	Puskesmas Bukit Surungan		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	
	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan		Rp 30,000,000	Puskesmas Kebun Sikolos		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan		Rp 30,000,000	

			Puskesmas					Puskesmas			
	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	Puskesmas Koto Katiak		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	
	Puskesmas Gunung		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	Puskesmas Gunung		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 30,000,000	
1.02.0 2.2.02 .35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Rp 30,000,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Rp 30,000,200	
1.02.0 2.2.02 .38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	1 Unit	Rp 1,038,647,697	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	1 Unit	Rp 1,038,647,697	

			Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65	Rp 130,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65	Rp 130,000,450	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	90 %	Rp 10,000,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	90 %	Rp 10,000,300	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Kesehatan	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktik mandiri)	Rp 10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Kesehatan	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktik mandiri)	Rp 10,000,300	

1.02.0 3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40 %	Rp 120,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40 %	Rp 120,000,150	
1.02.0 3.2.03 .01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 orang	Rp 120,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 orang	Rp 120,000,150	
1.02.0 4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minum	76.7	Rp 38,000,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minum	76.7	Rp 38,000,250	

	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 %	Rp 15,000,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 %	Rp 15,000,050	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah dokumen hasil penfngendalia n dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 dokumen	Rp 15,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah dokumen hasil penfngendalia n dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 dokumen	Rp 15,000,050	

			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan dan pengawasan	30	sarana			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan dan pengawasan	30	sarana		
1.02.0 4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	75	%	Rp 8,000,000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	75	%	Rp 8,000,200	

1.02.0 4.2.03 .01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	30	P-IRT	Rp 8,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	30	P-IRT	Rp 8,000,200	
1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	96.25	%	Rp 270,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	96.25	%	Rp 270,001,200	

1.02.0 5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	2 Keg	Rp 235,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	2 Keg	Rp 235,000,700	
	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat					Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat					
1.02.0 5.2.01 .01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Rp 85,000,000	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Rp 85,000,700	
			Jumlah lembaga yang penerima	2 lembaga	Rp 150,000,000			Jumlah lembaga yang penerima hibah	2 lembaga	Rp 150,000,000	

			hibah								
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 kelurahan	Rp 35,000,000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 kelurahan	Rp 35,000,500		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dab gerakan hidup bersih dan sehat	1 Dokumen	Rp 35,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dab gerakan hidup bersih dan sehat	1 Dokumen	Rp 35,000,500		

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Periode 2024-2026, dimana bab selanjutnya memaparkan pagu indikatif serta indikator.

2.4 Penelahaan usulan program , kegiatan dan subkegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan sudah dimulai dari tingkat paling bawah dan menjangkau seluruh aspirasi masyarakat. Seluruh usulan masyarakat di Kota Padang Panjang di evaluasi melalui pemantauan dan evaluasi ke lapangan, namun tidak seluruh aspirasi masyarakat tersebut dapat diakomodir disebabkan karena keterbatasan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

2.5. Penentuan Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Berisikan uraian mengenai:

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
1	2	3	4
Masih adanya Kematian Ibu (AKI) di Kota Padang Panjang dibawah target yang Kementerian Kesehatan	Pencegahan kematian ibu tidak dilakukan secara terintegrasi dan tidak didukung oleh sumber dayayang maksimal.	Profil Kesehatan	Pencegahan Kematian Ibu secara terintegrasi
Masih adanya Kematian Bayi (AKB) di Kota Padang Panjang diatas target Renstra dinkes	Adanya kelainan bawaandari bayi, komplikasi neonatus, Aspexia.	Profil Kesehatan	Pencegahan Kematian Bayi
Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting	Metode pencegahan dan penanganan yang dilakukan masih kurang tepat sasaran	Profil Kesehatan	Pencegahan dan Penanganan Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting Terintegrasi
Belum semua masyarakat Padang Panjang mempunyai Jaminan Kesehatan	kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN	Profil Kesehatan	Penguatan system janiman social kesehatan Kota Padang Panjang

Masih belum terkendalinya penyakit menular, seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru dan Penyakit Menular Lainnya	Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular serta pencegahannya	Profil Kesehatan	Peningkatan KIE kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok potensial di masyarakat tentang penyakit menular
Masih rendahnya pelayanan penderita penyakit tidak menular (Hipertensi, DM,	Masih belum maksimalnya skrining pelayanan kesehatan di masyarakat	Profil Kesehatan	Penguatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga
Masih rendahnya capai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan		Laporan SPM Tahun 2022	
Masih rendahnya Indeks keluarga sehat			

Derajat kesehatan merupakan salah satu sasaran prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2004 bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan, yang dapat diukur melalui umur harapan hidup (UHH)/ angka harapan hidup

Umur harapan hidup ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan). Secara umum pelayanan dan pengelolaan kesehatan di Kota Padang Panjang cukup baik, namun masih perlu lebih dioptimalkan. Optimalisasi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diperlukan dalam rangka tercapainya standar pelayanan minimal

bidang Kesehatan sehingga dapat menekan kasus kematian ibu hamil dan kematian bayi. Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal diindikasikan menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian bayi, ibu hamil.

Disamping itu tingginya kasus gizi kurang juga menjadi penyebab perlunya penguatan pelayanan primer dan rujukan. Isu stunting merupakan isu nasional yang merupakan program nasional yang ditargetkan dapat mencapai 14 persen pada tahun 2024. Dalam hal ini isu stunting juga merupakan isu utama di Kota Padang Panjang karena masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya terintegrasi antar berbagai pihak dalam penurunan stunting ini.

Anak stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, kesulitan dalam belajar, daya tahan tubuh yang lemah, berat badan cenderung turun dan sering demam atau sakit-sakitan. Penyebab stunting dapat juga terjadi sejak dari usia dalam kandungan, sangat rentan pada usia 1000 hari masa kehidupan. Bila kecukupan gizi selama masa kandungan tidak mencukupi maka rentan dengan kelahiran dengan berat badan rendah, panjang fisik di bawah rata-rata anak yang kelahirannya sehat.

Derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari angka indeks keluarga sehat, dimana untuk Kota Padang Panjang masih tergolong kategori rendah. Kebijakan intervensi perlu dilakukan termasuk pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan terutama sekali Puskesmas dan Poskeskel yang memenuhi standar mutu dan peningkatan kualitas sumber daya Kesehatan lainnya.

Upaya preventif melalui upaya promosi kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), disamping itu juga kesehatan lingkungan yang belum diterapkan masyarakat secara maksimal. Selain itu cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang belum tercapai di Kota Padang Panjang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Padang Panjang kedepan.

Relatif masih tingginya penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan salah satu akibat belum lengkapnya imunisasi dasar. Sekaitan dengan itu maka masih perlunya optimalisasi upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sebesar 100%.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 100%.
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.
4. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
6. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
9. Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
10. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%..

11. Persentase orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%
12. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100% :

Tingkat keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah sangat tergantung pada perangkat daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah harus konsisten dengan target capaian kinerja dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024 dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.

Berikut ini Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan produktifitas ekonomi sector unggulan daerah.
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas infra struktur
6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakhlak.
7. Meningkatkan tatanan kehidupan social masyarakat yang tentram dan agamis.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran Dinas Kesehatan dengan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang sebagai berikut:.

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Dinas Kesehatan	Indikator
Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup Prevalensi stunting

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2004-2026, mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 diantaranya yaitu :

“ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat “

dengan sasaran

“Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga “

4 (Empat) Indikator sebagai berikut :

1. Persentase penurunan Kematian Ibu target 25 %
2. Persentase penurunan Kematian Bayi target 20 %
3. Indeks Keluarga Sehat dengan target 0,47
4. Persentase UHC target 99.00%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) .Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang . Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Mengingat Dokumen Perencanaan Kota Padang Panjang tahun 2004-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2004-2026.

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi nya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan, maka untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Tahun 2004- 2006 yaitu **Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing** perlu menetapkan tujuan, sasaran. Tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :Angka Harapan Hidup sebesar 73,04 tahun dan Prevalensi Stunting diangka 11,05

Dengan sasaran Meningkatkan Status Kesehatan keluarga dengan indikator .:

1. Persentase penurunan Kematian Ibu target 25 %
2. Persentase penurunan Kematian Bayi target 20 %
3. Indeks Keluarga Sehat dengan target 0,45
4. Persentase UHC target 99,99%

Untuk Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dapat dilihatn pada Tabel 3.2.1 dan Tabel 3.2.2 berikut ini

Tabel 3.2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DINAS KESEHATAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup		73.02	73.03	73.04	73.06
			Prevalensi Stunting		14.76	11.05	10.03	9.01
		Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga	1 Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.44	0.47	0.49	0.51
			2 Persentase Penurunan Kematian Ibu	Persentase	33%	25%	25%	25%
			3 Persentase Penurunan Kematian Bayi	Persentase	18.2%	20%	20%	20%
			4 Presentase UHC	Persentase	98.90%	99.20%	99.20%	99.30%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

3.3.1. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- 1) Pencapaian Standar pelayanan Minimal Bidang kesehatan; dan
- 2) Pencapaian Tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2024

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ada 5 (lima) Program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebar di 4 Puskesmas, IFK dan RSUD Kota Padang Panjang. Adapun anggaran berdasarkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 144.322.759.717,- yang meliputi Program dan kegiatan untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota.
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan, Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

yang terdiri dari 1 Kegiatan yaitu

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan							Catatan
			Target Capaian Kinerja		PAGU ANGGARAN		Bertambah/berkurang		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum Perubahan	
1	2	3	5		6				
01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 99.330.722.031	Rp 101.031.314.627	Rp 1.700.592.596	101.031.310.547	#
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	Rp 78.129.428.119	Rp 81.108.451.186	Rp 2.979.023.067	81.110.602.436	##
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Rp 69.648.448.236	Rp 71.981.852.090	Rp 2.333.403.854	71.981.852.090	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	493 Orang	579 Orang	Rp 69.648.448.236	Rp 71.981.852.090	Rp 2.333.403.854	71.981.852.090	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Rp 247.180.000	Rp 245.680.000	-Rp 1.500.000	245.680.000	
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	Rp 247.180.000	Rp 245.680.000	-Rp 1.500.000	245.680.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Rp 467.479.900	Rp 443.435.100	-Rp 24.044.800	442.162.450	#
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	Rp 28.920.100	Rp 21.790.800	-Rp 7.129.300	18.446.200	#
	Dinas Kesehatan dan IFK		1 Paket	1 Paket	Rp 7.672.600	Rp 7.672.600	Rp -	4.328.000	

	Puskesmas Bukit Surungan		1 Paket	1 Paket	Rp 5.682.500	Rp 5.682.500	Rp -	5.682.500	
	Puskesmas Kebun Sikolos		1 Paket	1 Paket	Rp 5.000.000	Rp 2.870.700	-Rp 2.129.300	2.870.700	
	Puskesmas Koto Katiak		1 Paket	1 Paket	Rp 5.000.000	Rp -	-Rp 5.000.000	-	
	Puskesmas Gunung		1 Paket	1 Paket	Rp 5.565.000	Rp 5.565.000	Rp -	5.565.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	Rp 99.736.600	Rp 88.278.700	-Rp 11.457.900	93.198.400	#
	Dinas Kesehatan dan IFK		1 Paket	1 Paket	Rp 38.596.300	Rp 40.216.300	Rp 1.620.000	42.342.000	
	Puskesmas Bukit Surungan		1 Paket	1 Paket	Rp 15.287.500	Rp 15.287.500	Rp -	15.287.500	
	Puskesmas Kebun Sikolos		1 Paket	1 Paket	Rp 15.286.500	Rp 14.496.300	-Rp 790.200	14.496.300	
	Puskesmas Koto Katiak		1 Paket	1 Paket	Rp 15.287.900	Rp 3.000.000	-Rp 12.287.900	3.000.000	
	Puskesmas Gunung		1 Paket	1 Paket	Rp 15.278.400	Rp 15.278.600	Rp 200	18.072.600	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	Rp 38.825.200	Rp 35.367.600	-Rp 3.457.600	35.367.850	#
	Dinas Kesehatan dan IFK		1 Paket	1 Paket	Rp 24.996.000	Rp 24.995.700	-Rp 300	24.995.950	
	Puskesmas Bukit Surungan		1 Paket	1 Paket	Rp 3.457.300	Rp 3.457.300	Rp -	3.457.300	
	Puskesmas Kebun Sikolos		1 Paket	1 Paket	Rp 3.457.300	Rp 3.457.300	Rp -	3.457.300	
	Puskesmas Koto Katiak		1 Paket	1 Paket	Rp 3.457.300	Rp -	-Rp 3.457.300	-	
	Puskesmas Gunung		1 Paket	1 Paket	Rp 3.457.300	Rp 3.457.300	Rp -	3.457.300	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah lapran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	Rp 299.998.000	Rp 297.998.000	-Rp 2.000.000	295.150.000	##
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasaran aparatur yang memadai	80 %	80 %	Rp 1.494.250.400	Rp 1.461.286.700	-Rp 32.963.700	1.465.976.600	

1.02.01.2.07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraanPerorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	Rp 90.000.000	Rp 86.400.000	-Rp 3.600.000	90.000.000
1.02.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	12 Unit	Rp 923.781.000	Rp 923.781.000	Rp -	923.781.000
1.02.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	31 Unit	Rp 480.469.400	451.105.700	-Rp 29.363.700	452.195.600
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Rp 1.427.272.043	Rp 1.398.533.483	-Rp 28.738.560	1.390.433.483
1.02.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan surant menyurat yang disediakan	12 Laporan	5 Laporan	Rp 5.993.600	Rp 5.993.600	Rp -	5.993.600
	Dinas Kesehatan dan IFK			1 Laporan	Rp 1.996.800	Rp 1.996.800	Rp -	1.996.800
	Puskesmas Bukit Surungan			1 Laporan	Rp 998.400	Rp 998.400	Rp -	998.400
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Laporan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -	1.000.000
	Puskesmas Koto Katiak			1 Laporan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp -	1.000.000
	Puskesmas Gunung			1 Laporan	Rp 998.400	Rp 998.400	Rp -	998.400
1.02.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan		Rp 240.506.043	Rp 210.043.483	-Rp 30.462.560	210.043.483
	Dinas Kesehatan dan IFK			12 Laporan	Rp 58.376.238	Rp 46.796.238	-Rp 11.580.000	46.796.238
	Puskesmas Bukit Surungan			12 Laporan	Rp 45.595.145	Rp 50.367.980	Rp 4.772.835	50.367.980
	Puskesmas Kebun Sikolos			12 Laporan	Rp 48.400.190	Rp 39.735.000	-Rp 8.665.190	39.735.000
	Puskesmas Koto Katiak			12 Laporan	Rp 46.239.100	Rp 31.250.005	-Rp 14.989.095	31.250.005
	Puskesmas Gunung			12 Laporan	Rp 41.895.370	Rp 41.894.260	-Rp 1.110	41.894.260
1.02.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 Laporan		Rp 1.180.772.400	Rp 1.182.496.400	Rp 1.724.000	1.174.396.400

	Kantor	pelayanan perlengkapan kantor yang disediakan							
	Dinas Kesehatan dan IFK			12	Laporan	475.650.000	475.650.000	Rp -	475.650.000
	Puskesmas Bukit Surungan			12	Laporan	212.392.000	189.766.000	-Rp 22.626.000	189.766.000
	Puskesmas Kebun Sikolos			12	Laporan	209.992.000	211.716.000	Rp 1.724.000	211.716.000
	Puskesmas Koto Katiak			12	Laporan	108.182.400	108.182.400	Rp -	108.182.400
	Puskesmas Gunung			12	Laporan	174.556.000	197.182.000	Rp 22.626.000	189.082.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Rp 1.164.595.200	Rp 1.124.829.200	-Rp 39.766.000	1.131.663.200	
1.02.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp 33.600.000	Rp 14.128.000	-Rp 19.472.000	14.128.000	
1.02.01.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya	75 Unit	75 Unit	Rp 499.969.200	Rp 479.585.200	-Rp 20.384.000	486.909.200	
	Dinas Kesehatan dan IFK	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		26 Unit	Rp 279.988.000	Rp 284.380.000	Rp 4.392.000	284.204.000	
	Puskesmas Bukit Surungan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		12 Unit	Rp 54.989.000	Rp 45.789.000	-Rp 9.200.000	45.789.000	

	Puskesmas Kebun Sikolos	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		11 Unit	Rp 55.000.000	Rp 39.540.000	-Rp 15.460.000	39.540.000
	Puskesmas Koto Katiak	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		11 Unit	Rp 54.995.000	Rp 59.879.000	Rp 4.884.000	59.879.000
	Puskesmas Gunung	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya		15 Unit	Rp 54.997.200	Rp 49.997.200	-Rp 5.000.000	57.497.200
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Lainnya yang dipelihar	50 Unit	50 Unit	Rp 50.000.000	Rp 50.090.000	Rp 90.000	50.090.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Rp 581.026.000	Rp 581.026.000	Rp -	580.536.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Faskes yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		100 %	Rp 3.680.202.340	Rp 4.452.834.613	Rp 772.632.273	4.452.834.613
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang BLUD	JunMlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	4 BLUD	Rp 3.680.202.340	Rp 4.452.834.613	Rp 772.632.273	4.452.834.613
	RSU			BLUD			Rp -	-
	Puskesmas Bukit Surungan			1 BLUD	Rp 1.040.000.000	1.100.847.920	Rp 60.847.920	1.100.847.920
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 BLUD	Rp 1.265.202.340	Rp 1.691.915.422	Rp 426.713.082	1.691.915.422
	Puskesmas Koto Katiak			1 BLUD	Rp 625.000.000	Rp 734.964.364	Rp 109.964.364	734.964.364
	Puskesmas Gunung			1 BLUD	Rp 750.000.000	Rp 925.106.907	Rp 175.106.907	925.106.907
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	80 %	88 %	Rp 19.326.332.112	Rp 18.038.099.591	-Rp 1.288.232.521	18.038.725.661

	MASYARAKAT							
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	75 %	75 %	Rp 2.656.053.515	Rp 2.508.657.964	-Rp 147.395.551	2.514.005.464
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang dibangun	1 Unit	1 Unit	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000	Rp -	400.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya		4 Unit	2 Unit	Rp 80.000.000	Rp 27.939.395	-Rp 52.060.605	27.939.395
	Puskesmas Koto Katiak			1 Unit	Rp 20.000.000	Rp 24.119.395	Rp 4.119.395	24.119.395
	Puskesmas Kebun Sikolos			1 Unit	Rp 20.000.000	Rp 3.820.000	-Rp 16.180.000	3.820.000
	Puskesmas Bukit Surungan			Unit	Rp 20.000.000	Rp -	-Rp 20.000.000	-
	Puskesmas Gunung			Unit	Rp 20.000.000	Rp -	-Rp 20.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diadakan	1 Paket	4 unit	Rp 624.770.000	Rp 644.000.500	Rp 19.230.500	648.668.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan			172 unit	Rp 81.048.580	Rp 81.048.580	Rp -	81.048.580
1.02.02.2.01.22	pengembangan rumah sakit						Rp -	
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan (belum diinput)	2 Paket	5 Paket	Rp 1.441.176.535	Rp 1.326.611.089	-Rp 114.565.446	1.327.291.089

1.02.02.2.01.2 6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			5	Paket	Rp 29.058.400	Rp 29.058.400	Rp -	29.058.400
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 %	82 %		Rp 16.670.278.597	Rp 15.529.441.627	-Rp 1.140.836.970	15.524.720.197
1.02.02.2.02.0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1129 orang	974 orang		Rp 20.000.150	Rp 16.780.350	-Rp 3.219.800	16.779.950
1.02.02.2.02.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1077 orang	935 orang		Rp 19.999.900	Rp 19.999.900	Rp -	19.999.900
1.02.02.2.02.0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1026 orang	822 orang		Rp 56.511.450	42.851.450	-Rp 13.660.000	28.597.550
1.02.02.2.02.0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3957 orang	3501 orang		Rp 25.005.000	Rp 16.366.500	-Rp 8.638.500	16.366.450
1.02.02.2.02.0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12241 orang	11247 orang		Rp 28.620.100	Rp 20.575.580	-Rp 8.044.520	22.238.300
1.02.02.2.02.0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41185 orang	21274 orang		Rp 29.212.900	Rp 20.262.900	-Rp 8.950.000	20.262.650
1.02.02.2.02.0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4928 orang	orang		Rp 426.311.700	Rp 425.111.700	-Rp 1.200.000	422.309.700
	Dinas Kesehatan dan IFK	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang			Rp 83.711.800	Rp 82.511.800	-Rp 1.200.000	82.509.800

	Puskesmas Bukit Surungan	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1162	Rp 92.999.900	Rp 92.999.900	Rp -	92.999.900
	Puskesmas Kebun Sikolos	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	2265	Rp 76.800.000	Rp 76.800.000	Rp -	76.800.000
	Puskesmas Koto Katiak	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1292	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp -	67.200.000
	Puskesmas Gunung	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1171	Rp 105.600.000	Rp 105.600.000	Rp -	102.800.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	12234 orang	9006	Rp 34.420.900	Rp 34.420.900	Rp -	31.393.900
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	950 orang	813	Rp 79.982.950	Rp 77.272.900	-Rp 2.710.050	77.272.900
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapat pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat Sesuai standar	117 orang	224	Rp 14.999.100	Rp 9.769.400	-Rp 5.229.700	8.985.400
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan Sesuai standar	2331 orang	1572	Rp 227.091.050	Rp 208.887.400	-Rp 18.203.650	208.887.400
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1533 orang	1316	Rp 29.995.300	Rp 29.995.300	Rp -	29.995.300
1.02.02.2.02.13	pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	12 Dokumen	Rp 18.470.500	Rp -	-Rp 18.470.500	-

1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	60	Dokumen	60	Dokumen	Rp 727.496.650	Rp 732.481.850	Rp 4.985.200	732.481.700
	Dinas Kesehatan dan IFK	Jumlah Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK dan Anemi yg diberikan PMT	60	Orang			Rp 48.404.250	Rp 48.404.250	Rp -	48.404.250
	Puskesmas Bukit Surungan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Program Gizi	4	Kali			Rp 169.978.100	Rp 169.978.100	Rp -	169.977.950
	Puskesmas Kebun Sikolos						Rp 170.000.000	Rp 170.000.000	Rp -	170.000.000
	Puskesmas Koto Katiak						Rp 170.000.000	Rp 174.985.200	Rp 4.985.200	174.985.200
	Puskesmas Gunung						Rp 169.114.300	Rp 169.114.300	Rp -	169.114.300
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2	Dokumen	2	Dokumen	Rp 19.585.450	Rp 16.195.450	-Rp 3.390.000	16.428.450
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12	Dokumen	12	Dokumen	Rp 207.820.800	Rp 208.713.150	Rp 892.350	208.320.650
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Rp 194.650.050	Rp 194.650.050	Rp -	194.649.850
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Rp 51.736.000	Rp 51.736.000	Rp -	51.736.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12	dokumen	12	dokumen	Rp 796.455.600	Rp 754.989.000	-Rp 41.466.600	757.009.000
	Dinas Kesehatan dan IFK	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penyakit Menular dan tidak menular	40	Orang	40	Orang	Rp 602.055.600	Rp 560.589.000	-Rp 41.466.600	562.609.000
	Puskesmas Bukit Surungan	Jumlah pelaksanaan Pos Bindu PTM	27	Pos bindu	27	Pos bindu	Rp 57.600.000	Rp 57.600.000	Rp -	57.600.000
	Puskesmas Kebun Sikolos	Jumlah pelaksanaan penjangkaran PTM	2	Kegiatam	2	Kegiatam	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp -	50.400.000
	Puskesmas Koto Katiak						Rp 43.200.000	Rp 43.200.000	Rp -	43.200.000
	Puskesmas Gunung						Rp 43.200.000	Rp 43.200.000	Rp -	43.200.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan	15	Dokume	15	Dokume	Rp 9.710.532.600	Rp 8.710.547.600	-Rp 999.985.000	8.710.532.600

		kesehatan masyarakat	n	n				
	Dinas Kesehatan dan IFK	Jumlah Masyarakat yg diberikan jaminan pelayanan kesehatan	22000 Orang	22000 Orang	Rp 9.710.532.600	Rp 8.710.547.600	-Rp 999.985.000	8.710.532.600
1.02.02.2.02.28	pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional				Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp -	3.240.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 24.999.950	Rp 16.653.250	-Rp 8.346.700	28.341.850
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	48 Dokumen	Rp 2.717.777.750	Rp 2.697.578.250	-Rp 20.199.500	2.698.527.950
	Puskesmas Bukit Surungan	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	Rp 684.329.800	Rp 679.529.800	-Rp 4.800.000	679.529.500
	Puskesmas Kebun Sikolos	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	Rp 678.952.550	Rp 678.952.550	Rp -	678.952.550
	Puskesmas Koto Katiak	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	Rp 671.552.000	Rp 665.552.500	-Rp 5.999.500	665.552.500
	Puskesmas Gunung	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	Rp 682.943.400	Rp 673.543.400	-Rp 9.400.000	674.493.400
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	8 Dokumen	5 Dokumen	Rp 104.195.600	Rp 104.195.600	Rp -	104.195.600
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	4 Unit	4 Unit	Rp 30.000.000	Rp 45.000.000	Rp 15.000.000	45.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)				Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp -	9.000.000

1.02.02.2.02.3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	Rp 970.781.647	Rp 970.781.647	Rp -	970.781.647
1.02.02.2.02.4 2	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria			Orang	Rp 1.985.500	Rp 1.985.500	Rp -	1.985.500
1.02.02.2.02.4 6	pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			Rp 1 Dokumen	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	89.400.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65		Rp 1.051.012.850	Rp 1.091.359.350	Rp 40.346.500	1.111.752.150
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	90 %		Rp 10.000.300	Rp 6.270.000	-Rp 3.730.300	10.506.750
1.02.03.2.01.0 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Kesehatan	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktek mandiri) Dokumen	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktek mandiri) Dokumen	Rp 10.000.300	Rp 6.270.000	-Rp 3.730.300	10.506.750
1.02.03.2.02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota				Rp 8.400.000	Rp 33.051.400	Rp 24.651.400	49.472.200
1.02.03.2.02.0 3	pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan			1 Dokumen	Rp 8.400.000	Rp 33.051.400	Rp 24.651.400	49.472.200

1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40	%		Rp 1.032.612.550	Rp 1.052.037.950	Rp 19.425.400	1.051.773.200
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50	orang	Orang	Rp 1.032.612.550	Rp 1.052.037.950	Rp 19.425.400	1.051.773.200
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	76,7		76,7	Rp 403.159.450	Rp 394.189.300	-Rp 8.970.150	386.212.100
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85	%	85 %	Rp 76.747.700	Rp 53.682.750	-Rp 23.064.950	48.920.850
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30	dokumen	12 dokumen	Rp 76.747.700	Rp 53.682.750	-Rp 23.064.950	48.920.850
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	75	%	75 %	Rp 147.458.650	Rp 161.553.450	Rp 14.094.800	155.953.650

	Tangga									
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	30	P-IRT	30	P-IRT	Rp 147.458.650	Rp 161.553.450	Rp 14.094.800	155.953.650
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	70	%	70	%	Rp 178.953.100	Rp 178.953.100	Rp -	181.337.600
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	Sampel	75	Unit	Rp 178.953.100	Rp 178.953.100	Rp -	181.337.600
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	96,25	%	96,25	%	Rp 420.789.500	Rp 399.215.200	-Rp 21.574.300	384.018.200
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	2	Keg	2	Keg	Rp 244.796.300	Rp 220.881.600	-Rp 23.914.700	228.781.900

		daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kota							
	1.02.05.2.01.0 1	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 244.796.300	Rp 220.881.600	-Rp 23.914.700		228.781.900
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 keluraha n	16 keluraha n	Rp 34.229.800	Rp 36.570.200	Rp 2.340.400		13.485.300
	1.02.05.2.02.0 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dab gerakan hidup bersih dan sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 34.229.800	Rp 36.570.200	Rp 2.340.400		13.485.300
	1.02.05.2.03	pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase Puskesmas melaksanakan pembinaan UKBM /Pos yandu Aktif	100 %	100 %	Rp 141.763.400	Rp 141.763.400	Rp -		141.751.000
	1.02.05.2.02.0 1	bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)				Rp 141.763.400	Rp 141.763.400	Rp -		141.751.000

BAB IV PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan pendanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan)

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Supaya program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka sinergitas.

Dengan demikian diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan yg diharapkan sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan.

Padang Panjang, Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Padang Panjang

dr. Faizah

NIP. 19671014 200212 2 001

